

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, DERAJAT  
DESENTRALISASI FISKAL DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA  
TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI DIY TAHUN 2010-2019**

***ANALYSIS OF THE EFFECT OF ECONOMIC GROWTH, DEGREE OF FISCAL  
DECENTRALIZATION AND OPEN UNEMPLOYMENT RATE ON INCOME  
INEQUALITY IN DIY PROVINCE 2010-2019***

<sup>1)</sup>Anti Nur Izzati, <sup>2)</sup>Lorentino Togar Laut, <sup>3)</sup>Dinar Melani Hutajulu

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

Email : [antinizzati28@gmail.com](mailto:antinizzati28@gmail.com)

**Abstrak**

Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan pendapatan yang cukup besar antara masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan mereka yang berpendapatan rendah. Dalam sepuluh tahun terakhir (tahun 2010-2019) ketimpangan pendapatan Provinsi DIY selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi fiskal (DDF) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY pada tahun 2010 - 2019. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY dan BPS nasional. Data yang digunakan adalah data panel yang terdiri dari data *time series* selama tahun 2010-2019 (10 tahun) dan data *cross section* dari 5 kabupaten/kota di Provinsi DIY. Dalam mengestimasi model regresi pada penelitian ini digunakan metode analisis regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model (FEM)*. Hasil regresi menunjukkan bahwa: Variabel pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi fiskal dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY; Secara parsial, variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY; variabel derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY; variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY. Dengan demikian, tindak lanjut dari pemerintah daerah melalui penerapan kebijakan ekonomi maupun non ekonomi sangat diperlukan agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan ketimpangan pendapatan dapat berkurang.

Kata kunci: Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Derajat Desentralisasi Fiskal, Tingkat Pengangguran Terbuka

**Abstract**

*Income inequality is a sizeable difference in income between people with high incomes and those with low incomes. In the last ten years income in Yogyakarta Province has always been higher than national income inequality. This study aims to analyze the effect of economic growth, degree of fiscal decentralization and open unemployment rate on income inequality in Yogyakarta Province in 2010 - 2019. The type of data used in this study is secondary data sourced from the Central Agency Statistics (BPS) Yogyakarta Province and national BPS. The data used is panel data consisting of time series data for 2010-2019 and cross section data from*

*5 districts/cities in Yogyakarta Province. In estimating the regression model in this study, panel data regression analysis method was used using the Fixed Effect Model. The regression results show that: The variables of economic growth, degree of fiscal decentralization and open unemployment rate simultaneously have a significant effect on income inequality in Yogyakarta Province; Partially, the variable economic growth has no significant effect on income inequality in Yogyakarta Province; the variable degree of fiscal decentralization has a positive and significant effect on income inequality in Yogyakarta Province; the variable open unemployment rate has a negative and significant effect on income inequality in Yogyakarta Province. Thus, follow-up from local governments through the implementation of economic and non-economic policies is needed so that people's welfare can increase and income inequality can be reduced.*

*Keywords: Income Inequality, Economic Growth, Degree of Fiscal Decentralization, Open Unemployment Rate*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat setempat dalam kenyataannya masih sulit untuk dicapai. Tingkat kesejahteraan ekonomi yang dilihat dari pemerataan pendapatan masyarakat masih sering terlihat timpang. Sehingga masalah ketimpangan pendapatan ini menjadi salah satu masalah besar bagi banyak negara sedang berkembang, termasuk di negara Indonesia.

Menurut Khoirudin dan Musta'in (2020), masalah ketimpangan tidak selalu muncul di kota-kota besar. Begitu juga yang terjadi di Provinsi DIY, dimana berdasarkan data dari BPS, selama tahun 2010-2019 angka ketimpangan pendapatan tertinggi nasional terjadi di Provinsi DIY yang hanya memiliki satu wilayah kota (Kota Yogyakarta) dan empat wilayah kabupaten (Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul, dan Sleman).

Salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia adalah Indeks Gini (*Gini Ratio*). Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Koefisien Gini yang bernilai 0 dapat dikatakan terjadi pemerataan sempurna. Sementara, koefisien Gini yang bernilai 1 dikatakan ketimpangan sempurna.

Berdasarkan data dari BPS Nasional, indeks gini Provinsi DIY selama tahun 2010 hingga 2019 selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan indeks gini Indonesia. Menurut seorang ekonom *Intitute for Development of Economic and Finance (Indef)*, Bhima Yudhistira (Rochmi, 2017) menjelaskan bahwa tingginya ketimpangan pendapatan DIY selama ini salah satunya disebabkan oleh fenomena modernisasi. Dimana, pembangunan hotel dan berbagai pusat perbelanjaan di Provinsi DIY dinilai hanya memfasilitasi masyarakat ekonomi menengah keatas yang mulai mengikuti

gaya hidup masyarakat di kota-kota besar lainnya. Sementara kelompok masyarakat ekonomi menengah kebawah masih mempertahankan gaya hidupnya yang sederhana.

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meratakan distribusi pendapatan masyarakat. Namun, di Provinsi DIY tingginya pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh pemerataan ekonomi, sehingga mengakibatkan semakin tingginya angka ketimpangan.

Menurut Kuznets (dalam Tambunan, 2001), pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi akan memperbesar perbedaan antara kelompok masyarakat miskin dan kaya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartini (2017) juga mengatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.

Selain pertumbuhan ekonomi, kemampuan pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah juga menjadi salah satu determinan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi atau desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan, oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.

Berdasarkan teori kutub pertumbuhan menurut Tarigan (dalam Sianturi, 2011) dijelaskan bahwa kutub pertumbuhan dalam suatu daerah yang semakin banyak akan mampu meratakan distribusi pendapatan daerah tersebut dan menurunkan angka ketimpangannya, meskipun daerah-daerah kumuh (*slum*) akan tetap muncul. Namun seiring berjalannya waktu, daerah *slum* tersebut akan semakin berkurang pada saat kutub-kutub pertumbuhan ekonomi baru terus bertambah. Hasil penelitian Abdillah dan Mursinto (2014) juga menghasilkan temuan mengenai adanya korelasi yang negatif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dan ketimpangan ekonomi antar daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2006-2010.

Bersumber dari data BPS, diketahui bahwa selama tahun 2010 hingga 2019 terjadi penurunan kemampuan pemerintah Provinsi DIY dalam mengelola keuangan daerah.

Selain pertumbuhan ekonomi dan derajat desentralisasi fiskal, angka pengangguran juga diprediksi menjadi salah satu determinan ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY. Khoirudin dan Musta'in (2020) dalam penelitiannya memperoleh hasil mengenai adanya hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat

pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di DIY tahun 2012-2018. Pengangguran terbuka adalah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan serta mereka yang sudah punya pekerjaan namun belum mulai bekerja.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Nasional, tingkat pengangguran terbuka Provinsi DIY selama tahun 2010-2019 selalu lebih rendah apabila dibandingkan dengan rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Rendahnya angka pengangguran atau dengan kata lain banyaknya orang yang bekerja seharusnya menjadikan kesejahteraan masyarakat meningkat dan angka ketimpangan pendapatan dapat ditekan. Akan tetapi rendahnya tingkat pengangguran terbuka ini tidak diikuti dengan penurunan angka ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY.

Permasalahan ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi DIY dapat dikatakan cukup mengkhawatirkan apabila pemerintah setempat tidak segera menanganinya. Sehingga diperlukan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui determinan ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY. Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas, untuk

menganalisis pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY baik secara parsial maupun simultan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Derajat Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi DIY Tahun 2010-2019”.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Desain penelitian merupakan seluruh proses yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan sebuah penelitian (Nazir, 2017:70). Metode dengan pendekatan kuantitatif digunakan dalam menganalisis penelitian ini. Sementara dilihat dari tingkat eksplanasinya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat.

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY dan BPS nasional. Data yang digunakan adalah data panel yang terdiri dari data *time series* selama tahun 2010-2019 (10 tahun) dan data *cross section* dari 5 kabupaten/kota di Provinsi DIY. Sehingga dalam penelitian ini terdapat 50 observasi.

### **Variabel Penelitian**

Terdapat dua jenis variabel yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau munculnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari variabel Pertumbuhan Ekonomi, Derajat Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Pengangguran Terbuka.
2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Ketimpangan Pendapatan menjadi variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data sekunder digunakan dalam penelitian ini, dimana obyek penelitiannya didapatkan secara tidak langsung. Data-data sekunder tersebut diperoleh dari berbagai sumber informasi khusus dari suatu jurnal artikel atau sejenisnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Namun sebagian besar pengumpulan data pada penelitian ini bersumber dari publikasi BPS nasional dan regional yang terdiri dari BPS Provinsi DIY dan lima BPS kab/kota di Provinsi DIY.

### **Teknik Analisis Data**

#### **Analisis Regresi Data Panel**

Untuk menganalisis hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang digunakan, penelitian ini menerapkan

metode regresi data panel dengan *Eviews 10* sebagai *software* atau program olah data. Menurut Gujarati dan Porter (2013) data panel adalah gabungan antara data *cross section* dan data *time series*. Adapun model regresi data panel dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} +$$

$u_{it}$

Dimana:

$Y_{it}$  = Variabel terikat

$X_{it}$  = Variabel bebas

$i$  = 1, 2, 3, ... , n (data *cross section*)

$t$  = 1, 2, 3, ... , n (data *time series*)

$\alpha$  = Intersep

$\beta$  = Koefisien regresi variabel bebas

$u_{it}$  = Komponen error di waktu ke  $t$  untuk *unit cross section i*

Dalam penentuan spesifikasi model yang paling tepat, regresi data panel mempunyai tiga jenis model yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### *Common Effect Model (CEM)*

Metode CEM adalah metode atau pendekatan yang hanya menggabungkan data *time series* dan *cross section*. Metode ini tidak memperhatikan dimensi waktu atau individu, sehingga perilaku data antar individu dianggap sama dalam berbagai kurun waktu. Persamaan model *common*

*effect* menurut Gujarati dan Porter (2013) adalah sebagai berikut:

$$y_{it} = \alpha + \beta x_{it} + u_{it} ; i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

### 1. Fixed Effect Model (FEM)

Metode FEM atau teknik *Least Squares Dummy Variables* (LSDV) merupakan teknik untuk mengestimasi data panel menggunakan variabel *dummy* dalam menangkap adanya perbedaan intersep (Winarno, 2015). Metode ini menganggap bahwa ketidaksamaan antar individu mampu dikondisikan dari intersepanya yang juga berbeda. Model *fixed effect* dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$y_{it} = \alpha_i + \beta x_{it} + u_{it} ; i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

### 2. Random Effect Model (REM)

Metode REM atau *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS) merupakan model estimasi data panel yang variabel gangguannya diprediksi saling berkorelasi antar waktu dan antar individu. Model *random effect* dapat dinyatakan sebagai berikut (Gujarati dan Porter, 2013):

$$y_{it} = \alpha_0 + \beta x_{it} + w_{it} ; i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

dengan  $w_{it} = \varepsilon_i + u_{it}$  ;  $\varepsilon_i$  adalah komponen *error cross section*, dan  $u_{it}$  merupakan

keseluruhan *error* dari gabungan *time series* dan *cross section*.

## Penentuan Model Regresi Data Panel

Untuk memilih model terbaik dalam regresi data panel dapat dilakukan menggunakan tiga teknik estimasi model, yaitu: sebagai berikut:

### 1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk membandingkan model mana yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel, yaitu apakah CEM atau FEM. Apabila hasil pengujian menunjukkan probabilitas uji-F < alfa 5% maka model yang diterima adalah FEM, namun, model akan diujikan kembali menggunakan REM.

### 2. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan dalam proses pemilihan model regresi data panel terbaik yakni antara FEM atau REM (Gujarati dan Porter, 2013). Apabila hasil pengujian menunjukkan probabilitas uji hausman < alfa 5% maka model yang diterima adalah FEM.

### 3. Uji Langrange Multiplier (LM)

Uji *Langrange Multiplier* (LM) digunakan dalam pemilihan metode terbaik untuk regresi data panel, apakah akan menggunakan CEM atau REM. Apabila hasil pengujian menunjukkan probabilitas *Chi-square* < alfa 5% maka model yang diterima adalah REM.

## Pengujian Asumsi Klasik

Berikut empat uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini.

#### 1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam variabel pengganggu atau residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak (Gujarati dan Porter, 2013). Pengujian ini dilakukan menggunakan uji *Jarque Berra* (JB). Dikatakan residual berdistribusi normal apabila hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas  $>$  alfa 5% dan nilai JB  $<$  nilai Tabel *Chi Square*.

#### 2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi memiliki gangguan yang variannya sama (homokedastisitas) atau tidak. Heteroskedastisitas dapat terjadi jika nilai residual suatu model tidak mempunyai *variance* yang sama.

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas pada data dapat digunakan pengujian yang disebut dengan uji *Glejser*. Model regresi dikatakan terjadi masalah Heteroskedastisitas apabila hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas  $<$  alfa 5% (0.05).

#### 3. Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan untuk menguji ada tidaknya hubungan antar variabel independendalam suatu model regresi.

Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah multikolinearitas. Dalam melakukan uji multikolinearitas, dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Menurut Ghozali (2013), variabel tidak terkena masalah multikolinearitas apabila nilai *tolerance*  $>$  0,1 dan nilai VIF  $<$  10. Selain itu, pengujian multikolinearitas juga dapat dilakukan dengan melihat nilai *correlation matrix* yang tidak boleh lebih dari  $|0,8|$ .

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan periode  $t-1$  (sebelumnya) dalam suatu model regresi. Untuk menguji autokorelasi dapat dilakukan menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW-test) dengan cara membandingkan nilai uji *Durbin-Watson* dengan nilai Tabel *Durbin-Watson* (Ghozali, 2013). Dikatakan tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif apabila nilai *durbin upper* ( $du$ ) kurang dari nilai *durbin Watson* ( $dw$ ) dan kurang dari  $4-du$ , atau dapat ditulis menjadi  $du < d < 4-du$

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel

dependen. Nilai dari koefisien determinasi yaitu antara nol hingga satu. Nilai  $R^2$  yang mendekati nol atau sama dengan nol menunjukkan terbatasnya kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Sementara nilai  $R^2$  yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan dalam memprediksi variasi variabel dependen.

### Pengujian Hipotesis

#### 1. Uji Simultan (Uji F-Statistik)

Uji F-Statistik merupakan pengujian untuk menguji pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama (simultan). Dikatakan bahwa variabel bebas secara bersama-sama dapat berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat apabila hasil pengujian ini menunjukkan nilai prob  $t_{hitung} < \alpha$  5% atau  $F_{hitung} > F_{tabel}$ .

#### 2. Uji Parsial (Uji t-Statistik)

Uji parsial dilakukan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual. Pada pengujian ini dilakukan dengan dua sisi (*two tail*) dikarenakan arah hipotesis belum diketahui. Hipotesis penelitian ini menyebutkan bahwa masing-masing variabel bebas dapat berpengaruh signifikan terhadap variabel

terikat apabila nilai prob  $t_{hitung} < \alpha$  5% atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$ .

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

### Analisis Regresi Data Panel

Persamaan ekonometrika yang digunakan dalam regresi data panel untuk mengetahui korelasi variabel bebas terhadap variabel terikat pada penelitian adalah sebagai berikut:

$$KP_{it} = \alpha + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 DDF_{it} + \beta_3 TPT_{it} + u_{it}$$

Keterangan:

KP = Ketimpangan pendapatan (Indeks Gini)

PE = Pertumbuhan ekonomi (data laju PDRB)

DDF = Derajat desentralisasi fiskal

TPT = Tingkat pengangguran terbuka

$\alpha$  = Intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi variabel bebas

$u_{it}$  = Komponen error di waktu ke t untuk unit *cross section* i

i = 1, 2, 3, ... ,5 (data *cross section* kab/kota di Provinsi DIY)

t = 1, 2, 3, ... , 10 (data time series, tahun 2010-2019)

### Penentuan Model Regresi Data Panel Terbaik

#### 1. Uji Chow

Dari hasil uji Chow yang telah dilakukan, diperoleh nilai *Prob. Cross-*

*section Chi-square* yang lebih kecil dari alfa 0,05 yakni sebesar 0,0015 maka hipotesis  $H_0$  ditolak dan hipotesis  $H_a$  diterima. Dengan demikian estimasi model yang paling tepat digunakan pada penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

## 2. Uji Hausman

Berdasarkan hasil pengujian Hausman pada penelitian ini, diketahui nilai *Prob. Cross-section random* sebesar 0,0005 atau kurang dari alfa 0,05. Dengan demikian, maka model *fixed effect* (FEM) lebih tepat digunakan daripada model *random effect*.

Dikarenakan pada hasil kedua pengujian tersebut telah menunjukkan kesimpulan yang sama yaitu FEM sebagai model yang paling tepat digunakan pada penelitian ini, maka uji *Langrange Multiplier* tidak perlu untuk digunakan.

Sehingga, berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) menjadi model yang paling tepat digunakan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi fiskal dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY tahun 2010-2019 dengan hasil estimasi sebagai berikut:

$$KP_{it} =$$

$$0.3353 - 0.0025PE_{it} + 0.0056DDF_{it} - 0.0220TPT_{it} + u_{it}$$

(0.0000)\* (0.5957) (0.0000)\* (0.0001)\*

$R^2 = 0.438123$ ; Adj.  $R^2 = 0.401479$ ; F-Stat. = 11.95617; Sig. F-Stat. = 0.000007

Keterangan: \*Signifikan pada  $\alpha = 0,01$ ; Angka dalam kurung = probabilitas nilai t-statistik.

## Pengujian Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan, dapat diketahui nilai uji Jarque-Bera yaitu sebesar 5.825374 dengan probabilitasnya senilai 0.054330 atau lebih besar dari alfa 0.05 sehingga  $H_0$  diterima. Dengan demikian, pengujian asumsi klasik normalitas yang menyatakan bahwa residual harus terdistribusi normal telah terpenuhi.

### 2. Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini, diketahui nilai probabilitas dari masing-masing variabel independen lebih besar daripada alfa 5% (0,05), yaitu nilai probabilitas PE sebesar 0.5166, nilai probabilitas DDF sebesar 0,8343, dan nilai probabilitas TPT sebesar 0.1760. Dengan demikian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan tingkat kepercayaan 5% data yang digunakan pada penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

### 3. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan nilai *correlation matrix* pada hasil uji Multikolinearitas diketahui bahwa koefisien korelasi antar variabel *independent* (PE, DDF dan TPT) pada penelitian ini bernilai kurang dari 0,8. Dengan demikian, dalam penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel.

### 5. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model*, diketahui nilai Durbin-Watson pada penelitian ini adalah 1,798 dengan total observasi 50(n) dan jumlah variabel sebanyak 4 (k=4). Dengan membandingkan nilai uji *Durbin-Watson* dengan nilai tabel *Durbin-Watson*, maka diperoleh *durbin lower* ( $d_L$ ) sebesar 1.421 dan *durbin upper* ( $d_U$ ) sebesar 1.674 dengan nilai  $4-d_u$  sama dengan 2,326. Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi pada model penelitian ini karena nilai 1.798 (dw) lebih besar dari 1.674 ( $d_u$ ) dan lebih kecil dari 2.326 ( $4-d_u$ ) atau  $d_u < dw < 4-d_u$ .

### Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model*, diperoleh nilai *Adjusted R-squared* pada penelitian ini berdasarkan hasil regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* adalah

0,401479 yang berarti bahwa variabel independen (pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi fiskal dan tingkat pengangguran terbuka) dapat menjelaskan variabel dependen ketimpangan pendapatan sebesar 40,15 persen dan sisanya 59,85 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar model tersebut.

### Pengujian Hipotesis

#### 1. Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* diperoleh nilai F-hitung sebesar 11,95617 yang lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  sebesar 2,807 dan nilai probabilitas  $F_{hitung}$  sebesar 0,000007 lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi fiskal dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY tahun 2010- 2019.

#### 2. Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil regresi menggunakan *Fixed Effect Model*, pengaruh masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi (X1) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY tahun 2010-2019.

Dengan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu -0,534352 < -1,678 dan nilai probabilitas uji t sebesar 0,5957 lebih besar dari nilai taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dengan demikian dapat diartikan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Y). Berikut disajikan gambar kurva hasil uji t pada variabel pertumbuhan ekonomi (X1).

2. Pengaruh derajat desentralisasi fiskal (X2) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY tahun 2010-2019.

Dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu 6,654555 > 1,678 dan nilai probabilitas uji t sebesar 0,0000 lebih kecil dari nilai taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat diartikan bahwa variabel derajat desentralisasi fiskal (X2) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Y).

3. Pengaruh tingkat pengangguran terbuka (X3) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY tahun 2010-2019.

Dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu -4,354084 > -1,678 dan nilai probabilitas uji t adalah 0,0001 yang

artinya lebih kecil dari nilai taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat diartikan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka (X3) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Y).

### **Interpretasi Pengaruh Model Terpilih**

Berdasarkan hasil uji parsial dapat disimpulkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan adalah variabel derajat desentralisasi fiskal dan tingkat pengangguran terbuka, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY tahun 2010-2019.

#### **1. Derajat Desentralisasi Fiskal**

Berdasarkan hasil regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* dapat diketahui nilai koefisien regresi variabel derajat desentralisasi fiskal bernilai 0.005669, artinya apabila nilai variabel derajat desentralisasi fiskal rata-rata sebesar 1 persen, maka ketimpangan pendapatan rata-rata meningkat sebesar 0.005669 persen, dengan asumsi variabel bebas lainnya adalah konstan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY tahun 2010-2019.

#### **2. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Berdasarkan hasil regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* diketahui nilai koefisien regresi variabel tingkat pengangguran terbuka bernilai -0.022002, artinya jika nilai variabel tingkat pengangguran terbuka rata-rata sebesar 1 persen, maka ketimpangan pendapatan rata-rata menurun sebesar 0.022002 persen, dengan asumsi variabel bebas lainnya adalah konstan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY tahun 2010-2019.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Derajat Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi DIY tahun 2010-2019**

Ketimpangan pendapatan dapat terjadi apabila distribusi pendapatan pada masyarakat tidak merata (Amri, 2017). Hasil penelitian Amri (2017) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan penurunan jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan akan mampu mengurangi ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY selama tahun 2010-2019.

Tanggung jawab pemerintah daerah atas lima kabupaten/kota di provinsi ini akan berjalan dengan baik jika tugas dan

wewenang daerah tidak dikontrol penuh oleh pemerintah pusat. Penerapan sistem desentralisasi dalam otonomi daerah menjadi kebijakan yang dipandang sebagai usaha untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang ditandai dengan penurunan ketimpangan pendapatan (Rosa dan Sovita, 2016).

Dyah (2012) dalam penelitiannya menghasilkan temuan mengenai adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Begitu pula yang terjadi di Provinsi DIY tahun 2010-2019, dimana besarnya derajat desentralisasi fiskal cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan. Kondisi ini dapat terjadi karena pendapatan daerah Provinsi DIY lebih banyak digunakan dalam pembiayaan belanja sektor konsumtif daripada belanja sektor produktif.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi DIY selama tahun 2010-2019 menyebabkan tingkat ketimpangan pendapatan menurun. Kondisi ini disebabkan pengangguran terbuka lebih banyak terjadi di daerah perkotaan daripada di daerah pedesaan. Meskipun demikian, tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY mengalami penurunan dan terjadi pemerataan pendapatan masyarakat, namun pemerataan tersebut berada pada kelas perekonomian yang rendah.

Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji F, pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi fiskal dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama dapat berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY selama tahun 2010-2019. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Khoirudin dan Musta'in (2020) serta Rosa dan Sovita (2016).

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi DIY tahun 2010-2019**

Berdasarkan hasil regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM), diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY tahun 2010 hingga tahun 2019.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY meningkat pesat, ternyata tidak berpengaruh terhadap peningkatan maupun penurunan ketimpangan pendapatan. Kondisi ini dapat terlihat dari data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY mengenai pesatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 dan 2019 yang secara berturut-turut mencapai angka 6,20% dan 6,59%, sedangkan sejak tahun 2010 hingga 2018 selalu berada di rentang angka 4,8%-5,47%. Di sisi lain, angka ketimpangan pendapatan

sejak tahun 2010 hingga 2019 masih berada di rentang angka 0,4% yang artinya belum terjadi peningkatan maupun penurunan yang signifikan pada ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY tahun 2010-2019.

Dibangunnya bandara internasional Yogyakarta (YIA) di Kabupaten Kulon Progo mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY hingga berada di angka 6,6% di tahun 2019 ([www.antaranews.com](http://www.antaranews.com)). Hal ini dapat diketahui dari data BPS Provinsi DIY yang menunjukkan tingginya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo, yaitu mencapai 10,84% di tahun 2018 yang kemudian meningkat lagi menjadi 13,49% pada tahun 2019. Sementara pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta tidak mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan masih bergerak fluktuatif di rentang angka empat hingga lima persen. Data tersebut menunjukkan adanya ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten/kota Provinsi DIY yang mengakibatkan tingginya pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan maupun kenaikan ketimpangan pendapatan. Sehingga masih diperlukan kebijakan pemerintah untuk meratakan pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY supaya dapat menurunkan tingkat ketimpangan.

Menurut Wie (dalam Apriesta dan Miyasto, 2013) pertumbuhan ekonomi yang pesat di suatu negara juga dapat diikuti dengan tingginya ketimpangan pendapatan apabila masalah kemiskinan belum teratasi sepenuhnya. Berdasarkan data dari BPS, angka kemiskinan DIY di tahun 2019 adalah 11,7% yang artinya lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional yakni 9,41%. Provinsi DIY berada di urutan ke-12 angka kemiskinan tertinggi di Indonesia, dan menjadi yang termiskin di Pulau Jawa.

Dengan demikian, tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten/kota Provinsi DIY dan masih tingginya angka kemiskinan di provinsi ini menjadi alasan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan tidak memberikan pengaruh yang signifikan.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Niyimbanira (2017) serta Khoirudin dan Musta'in (2020). Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dkk. (2019) menyimpulkan hasil yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan waktu yang digunakan dalam penelitian. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY tahun 2011-2017. Dimana pada tahun tersebut belum ada pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta (YIA) yang

menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo meningkat secara pesat hingga mencapai angka 13,49% di tahun 2019.

### **Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi DIY tahun 2010-2019**

Berdasarkan hasil regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Mode* (FEM) dapat diketahui bahwa variabel derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY tahun 2010-2019.

Meningkatnya tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya, seharusnya semakin meningkat kesejahteraan masyarakat dan semakin menurun ketimpangan pendapatan masyarakat. Namun dalam praktiknya ternyata belum terjadi di Provinsi DIY selama tahun 2010-2019. Hal ini dikarenakan pendapatan daerah Provinsi DIY lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja sektor konsumtif daripada belanja sektor produktif. Menurut publikasi dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mengkaji tentang keuangan daerah Provinsi DIY, pada tahun 2019 dana belanja daerah dialokasikan untuk sektor produktif sebesar 34,70 persen. Sementara, dana belanja daerah yang dialokasikan untuk sektor

konsumtif lebih banyak yaitu sebesar 65,30 persen.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Dyah (2012) yang menghasilkan temuan mengenai adanya pengaruh yang positif signifikan antara desentralisasi fiskal dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Artinya, besarnya tingkat desentralisasi fiskal akan cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan.

### **Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi DIY tahun 2010-2019**

Berdasarkan hasil regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM), diketahui bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY tahun 2010-2019.

Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DIY selama sepuluh tahun terakhir ini (tahun 2010-2019) menyebabkan tingkat ketimpangan pendapatan menurun. Hal ini dikarenakan pengangguran terbuka lebih banyak terjadi di daerah dengan struktur ekonomi yang bercorak non agraris atau daerah perkotaan (Sleman dan Kota Yogyakarta) daripada daerah dengan struktur ekonomi yang bercorak agraris atau daerah pedesaan (Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul).

Rendahnya tingkat pengangguran terbuka di daerah pedesaan disebabkan karena masyarakat di daerah pedesaan yang tidak terlalu selektif dalam memilih pekerjaan, sehingga mereka akan bekerja apa saja meskipun berstatus sebagai pekerja keluarga maupun pekerja bebas di bidang pertanian. Sehingga, meskipun tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan lebih tinggi daripada di daerah pedesaan, tingkat ketimpangan pendapatan dapat menurun dan mengakibatkan pendapatan masyarakat merata, namun pemerataan tersebut berada di kelas perekonomian kategori rendah.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Dwiputra (2018) serta Ilham dan Pangaribowo (2017) mengenai adanya hubungan negatif dan signifikan antara tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil uji simultan (uji F) diketahui bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi fiskal dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY tahun 2010-2019.

2. Dari hasil uji parsial (uji t) diketahui bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY tahun 2010-2019. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY tidak berpengaruh terhadap peningkatan maupun penurunan ketimpangan pendapatan.
3. Dari hasil uji parsial (uji t) diketahui bahwa variabel derajat desentralisasi fiskal (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY tahun 2010-2019. Artinya, semakin meningkat derajat desentralisasi fiskal, maka akan semakin meningkat pula ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY.
4. Dari hasil uji parsial (uji t) diketahui bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY tahun 2010-2019. Artinya, semakin meningkat tingkat pengangguran terbuka, maka akan semakin menurun ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan pada penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Masih diperlukan inovasi untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan sumber perekonomian, dan meratakan hasil pembangunan bagi masyarakat Yogyakarta sehingga ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY dapat ditekan.
2. Sumber keuangan daerah perlu dikelola secara tepat oleh pemerintah daerah Provinsi DIY supaya dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas publik yang dapat digunakan masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya sehingga tingkat ketimpangan pendapatan juga dapat ditekan.
3. Perlunya perhatian yang lebih mendalam dari pemerintah daerah mengenai kesempatan kerja dengan cara memaksimalkan setiap potensi SDM dan SDA yang ada di setiap daerah secara berkelanjutan agar produktivitas masyarakat semakin meningkat yang nantinya akan berdampak pada penurunan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat ketimpangan pendapatan.
4. Masalah ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY selalu menjadi yang tertinggi di Indonesia. Sehingga perlu dilakukan dorongan atau tindakan dari pemerintah daerah melalui penerapan kebijakan di bidang ekonomi maupun non ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan menurunkan ketimpangan pendapatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, K., dan Mursinto, D. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah serta Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3, 187–197.
- Amri, K. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Panel Data 8 Provinsi di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi (EMT)*, 1(1), 1–11.
- Apriesa, L. F., dan Miyasto. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus: Kabupaten / Kota di Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Economics*, 2, 1–12.
- BPS. (2020). *Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>
- BPS Provinsi DIY. (2020). *Badan Pusat Statistik*. <https://yogyakarta.bps.go.id/>
- Dwiputra, R. M. (2018). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia (periode 2011-2016). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Brawijaya*.
- Dyah, S. M. (2012). The Impact of Fiscal Decentralization on Income Inequality in Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 8(3), 293–309.
- Ghozali, I. (2013). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 8*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP (UNDIP Press).
- Gujarati, D. N., dan Porter, D. C. (2013). *Dasar-dasar Ekonometrika* (R. . Terjemahan Mangunsong (ed.); Jakarta: Salemba Empat.
- Hartini, N. T. (2017). Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi dan IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Daerah di Provinsi DIY Tahun 2011-2015. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 6(6), 530–539.
- Ilham, M., dan Pangaribowo, E. H. (2017). Analisis Ketimpangan Ekonomi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Bumi Indonesia*, 6(4).
- Khoirudin, R., dan Musta'in, J. L. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tirtayasa EKONOMIKA*, 15(1), 17–30.
- Kusuma, D. S. D., Sarfiah, S. N., dan Septiani, Y. (2019). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017. *Dinamic: Directory Journal of Economic*, 1(3), 338–347.
- Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Niyimbanira, F. (2017). Analysis of the Impact of Economic Growth on Income Inequality and Poverty in South Africa: The Case of Mpumalanga Province. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 254–261.
- Rochmi, M. N. (2017). *Kenapa Yogyakarta menjadi Provinsi Paling Timpang di Indonesia*. 19 Juli 2017. <https://beritagar.id/artikel/berita/kenapa-yogyakarta-menjadi-provinsi-paling-timpang-di-indonesia>
- Rosa, Y. Del, dan Sovita, I. (2016). Analisis

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa. *Jurnal Menara Ekonomi*, 2(4), 41–52.

Sianturi, S. (2011). *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Wilayah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara)*. <http://eprints.undip.ac.id/29289/1/Jurnal.pdf>

Sutarmi. (2020). *Bandara YIA Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Kulon Progo*. <https://www.antaraneews.com/berita/1773405/bandara-yia-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi-kulon-progo>

Tambunan, T. T. H. (2001). *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Winarno, W. W. (2015). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews, Edisi Keempat*. UPP AMP YKPN.